

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta. PT Rineka Cipta.
- Fadjar, A. Mukhtie. 2010. *Konstitusionalisme Demokrasi*. Malang. In-TRANS Publishing.
- Hadi, Nurudin. 2007. *Wewenang Mahkamah Konstitusi*. Jakarta. Prestasi Pustaka Publisher.
- Harrison, Lisa. 2007. *Metodologi Penelitian Politik*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Norman K. Denzin & Yvonna S. Lincoln (Eds). 2009. *Handbook Of Qualitative Research*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Nurhasyim, Moch. (Ed). 2003. *Konflik Antarelit Politik Lokal Dalam Pemilihan Kepala Daerah: Kasus Maluku Utara, Jawa Timur dan Kalimantan Tengah*. Jakarta. Pusat Penelitian Politik (P2P)-LIPI.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Konflik Dalam Pilkada Langsung (2005-2008): Studi tentang Penyebab dan Dampak Konflik*. Jakarta. LIPI Press.
- Nuryanti, Sri. (Ed). 2006. *Analisis Proses dan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Langsung 2005 Di Indonesia*. Jakarta. LIPI Press.
- Ramdansyah. 2009. *Sisi Gelap Pemilu 2009: Potret Aksesori Demokrasi Indonesia*. Jakarta. Rumah Demokrasi.
- Romli, Lili. (Ed). *Evaluasi Pemilihan Umum 2004: Analisis Proses dan Hasil Pemilu Legislatif*. Jakarta. Pusat Penelitian Politik (P2P)-LIPI.
- Rozi, Syafuan. (ed). 2006. *Netralitas Birokrasi Dalam Pilkada Langsung di Indonesia 2005; Studi Kasus Malang, Gowa dan Kutai Kartanegara*. Jakarta. LIPI Press.
- Sadikin, Nur Hidayat. 2011. *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*. Yogyakarta. Fajar Media Press.
- Siahaan, Maruarar. 2011. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Surbakti, Ramlan., Didik Supriyanto. dan Topo Susanto. 2008. *Rekayasa Sistem Pemilu Untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis*. Jakarta. Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia.
- Susan, Novri. 2009. *Sosiologi Konflik Dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.

- Strauss, Anselm., dan Juliet Corbin. 1997. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif: Prosedur, Teknik, dan Teori Grounded*. Surabaya. PT. Bina Ilmu.
- Yusdiansyah, Rfik. 2010. *Implikasi Keberadaan Mahkamah Konstitusi terhadap Pembentukan Hukum Nasional dalam Kerangka Negara Hukum*. Bandung. Lubuk Agung.
- Tesis. 2006. Klolidin. "Peranan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Dalam Penanganan Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Langsung: Studi Tentang Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Depok, Jawa Barat Peiode Tahun 2006-2011". Pascasarjana. Fakultas Hukum. Universitas Indonesia.
- Tesis. 2009. Topo Santoso. "Settle of Election Offences in Fair Saitheast Asian Countries (With Special Reference to The Indonesian General Elections). Faculty of Law. University of Malaya.
- Jurnal. *Konstitusi*. Volume 4. No 1. Maret 2007. M. Faishal Aminuddin. "Pelebagaan Demokrasi Konstitusional: MK dan Masa Depan Demokratisasi di Indonesia". Hal 82-105.
- Jurnal. *Konstitusi*. Volume 4. No 1. Maret 2007. Ahmad Syahrizal. "Problem Implementasi Putusan MK". Hal 106-125.
- Jurnal Penelitian Politik. Vol 4. No 1. 2007. Johny Limolos. "Sikap Pemilih terhadap Pasangan Calon Kepala Daerah Menjelang Pilkada Langsung di Kota Bitung". Hal 33-47.
- Jurnal *Konstitusi*. Volume 6. Nomor 1. April 2009. A. Mukthie Fadjar. "Pemilu yang Demokratis dan Berkualitas: Penyelesaian Hukum Pelanggaran Pemilu dan PHPU". Hal 1-24.
- Jurnal *Konstitusi*. Vol. II. No 1. Juni 2009. Rudatyo. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menangani Sengketa Hasil Pemilu". Hal 8-20.
- Jurnal. *Konstitusi*. Vol. II. No 1. Juni 2009. Miftachus Sjuhad. "Mengenal Ihwal Demokrasi Konstitusional". hal 38-63.
- Jurnal *Konstitusi*. Volume 6. Nomor 2. Juli 2009. Riri Nazriyah. "Implikasi Putusan MK Terhadap Netralitas PNS Dalam Pilihan Kepala Daerah. Hal 63-82.
- Jurnal *Konstitusi*. Volume 7. Nomor 5. Oktober 2010. Veri Junaidi. "Pelanggaran Sistematis, Terstruktur dan Masif: Suatu Sebab Pembatalan Kehendak Rakyat dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2010". Hal 41-72.
- Jurnal *Ilmu Sosial Ilmu Politik*. Volume 11. No 1. Juli 2007. Cornelis Lay. "Pilkada Langsung dan Pendalaman Demokrasi". Hal 63-92.

- Jurnal *Ilmu Sosial Ilmu Politik*. Volume 11. No 1. Juli 2007. Amalinda Savira. "Dilema Para Politisi di Tingkat Lokal: Anatar Mimpi Inovasi dan Demokrasi". Hal 93-118.
- Jurnal *Ilmu Sosial Ilmu Politik*. Volume 13. No 2. November 2009. Haryanto. "Elit Politik Lokal dalam Perubahan Sistem Politik". Hal 131-148.
- Jurnal *Ilmu Sosial Ilmu Politik*. Volume 13. No 2. November 2009. A.A. Gede Febri Purnama Putra. "Peran Negara dalam Menciptakan Perdamaian: Kasus Pilkada Langsung di Kab. Gianyar dan Kab. Buleleng, Provinsi Bali". Hal 172-189.
- Kajian Bulanan. Edisi 02. Juni 2007. Lingkar Survei Indonesia. "Incumbent dan Pilkada". Hal 1-28.
- Kajian Bulanan. Edisi 03. Juli 2007. Lingkar Survei Indonesia. "Pilkada dan Penguasa Partai Politik". Hal 1-28.
- Kajian Bulanan. Edisi 05. September 2007. Lingkar Survei Indonesia. "Golput Dalam Pilkada". Hal 1-36.
- Majalah Konstitusi. Berita Mahkamah Konstitusi. No 40. Mei 2010. "lonjakan Perkara Pemilukada".
- Majalah Konstitusi. Berita Mahkamah Konstitusi. No 41. Juni 2010. "Pelanggaran Pemilukada (Masuk) Signifikan".
- Majalah Konstitusi. Berita Mahkamah Konstitusi. No 47. Desember 2010. "Pulihkan Hak pilih, Pemilukada Diulang".
- Majalah Konstitusi. Berita Mahkamah Konstitusi. No 50. Maret 2011. "Demi Keadilan Pemeriksaan Dilanjutkan".
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (Perubahan I, II, III & IV).
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Prdoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.
- Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 31/PHPU.D-VIII/2010 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Daerah Kota Surabaya Tahun 2010.

Putusan Akhir Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 31/PHPU.D-VIII/2010 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Daerah Kota Surabaya Tahun 2010.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 71 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara.

Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 313/KPU/V/2010 tentang Penjelasan tentang Coblos Tembus dalam Pemilu 2010.

Buku Saku Pemilih: Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Surabaya Tahun 2010. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya. Februari 2010. (dipublikasikan terbatas).

Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Umum: Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Surabaya Tahun 2010. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya. Desember 2010. (tidak dipublikasikan).

Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Surabaya Tahun 2010. Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Surabaya. Oktober 2010. (tidak dipublikasikan).

ACE (The Electoral Knowledge Network). <http://aceproject.org>.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>.

Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Surabaya. <http://www.kpusurabaya.go.id>.

Fletcher, Fred."Free and Fair: Regulations That Ensure a *"fair go"*. <http://www.sisr.net/publications/0706fletcher.pdf>. 28 Juli 2011: 01:09 pm.

Nduru, Gladys."The Challenges of Conducting Free and Fair Elections And Referenda". <http://www.ec.or.ug/.pdf>. 28 Juli 2011: 01:11 pm.

Sakuntala Kadirgamar, Rajasingham. "Essentials of Free and Fair Election". International IDEA Paper Presented at Regional Dialogue on Free, Fair Elections Islamabad Pakistan. By Organized PILDAT. 29-30 June 2005. [http://www.idea.int/asia\\_pacific/nepal/upload/pdf](http://www.idea.int/asia_pacific/nepal/upload/pdf). 28 Juli 2011: 01:13 pm.

Likoti, Foko Johnson."Good Governance: The Role of The Independent Electoral". Association Of Eastern And Law Reform Institute And East Southern Africa Conference In South Africa Conference in Maseru. On 11-14 October 2010. <http://www.lrcet.go.tz/.pdf>. 28 Juli 2011: 01:14 pm.

- Szép, Attila. Pendidikan Pemilih: Pemilu Bebas dan Adil di Slovakia. "Peran Institut Forum Studi Sosial dalam Periode Pra-Pemilu di Tahun 1998". Open Society Institute (Institusi Pemerintah Daerah dan Reformasi Layanan Publik). Bratislava, 1 April 1998. <http://lgi.osi.hu/Aszep.doc>. 28 Juli 2011: 01:15 pm.
- Fala, Adil Omar. "Electons and Democratization: A New Assessment". [http://www.democ.uci.edu/Fala\\_ElectionsDemocratization.pdf](http://www.democ.uci.edu/Fala_ElectionsDemocratization.pdf). 28 Juli 2011: 01:17 pm.
- Pereira, Lucilia. "Free and Fair: The Politicization of Election Monitoring Reports". A Thesis Submitted to the College, Department of Political Studies. University of Saskatchewan University of Saskatchewan. October 2006. [http://library2.usask.ca/theses/available/etd-unrestricted/periera\\_1.pdf](http://library2.usask.ca/theses/available/etd-unrestricted/periera_1.pdf). 28 Juli 2011: 01:18 pm.
- Regalia, Marta. "Election Observation Missions: How to assess effectiveness?". ECPR Graduate Conference. Istituto Italiano di Scienze Umane Dublin, August 2010. <http://www.ecprnet.eu/conferences/papers/897.pdf>. 28 Juli 2011: 01:23 pm.
- Adamu, Nasiru. "Concept of Democratic Elections Under International Law". Research Journal of International Studies - Issue 10 (April, 2009). School of Law, Wuhan University, Wuhan, Hubei, China. [http://www.eurojournals.com/rjis\\_10\\_02.pdf](http://www.eurojournals.com/rjis_10_02.pdf). 28 Juli 2011: 01:25 pm.
- Jowitt, Anita. "Free and Fair Elections: Societal Challenges to Vanuatu's Electoral System". <http://journals.upd.edu.ph/index.php/kasarinlan/article/download/324/319>. 28 Juli 2011: 01:27 pm.
- Fletcher, Fred. "Free And Fair Elections: Regulations That Ensure a 'Free Go' ". Notes For Talk in ARC Centre for Creative Industries and Innovation. Swinburne. University of Technology Melbourne, Australia. June 20, 2007. <http://www.sisr.net/publications/0706fletcher.pdf>. 28 Juli 2011: 01:30 pm.

Lampiran:

1. Amar Putusan MK Nomor: 31/PHPU.D-VIII/2010 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Daerah Kota Surabaya Tahun 2010.
2. Putusan Akhir Putusan MK Nomor: 31/PHPU.D-VIII/2010 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Daerah Kota Surabaya Tahun 2010.
3. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 313/KPU/V/2010 tentang Penjelasan tentang Coblos Tembus dalam Pemilukada 2010.